

## **Abstrak**

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan Pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun sebenarnya jaminan perpanjangan tersebut tidak serta merta diberikan melainkan melalui pertimbangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan bagaimana perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan operasi kontrak/perjanjian nya ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekaburan norma yang menimbulkan belum adanya kepastian hukum dalam Pasal 169A UU Minerba yang mengatur IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Ketentuan mengenai aturan tersebut harus dijelaskan menggunakan frasa yang jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan pelaksana UU Minerba agar tidak menimbulkan multi tafsir guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pertambangan.

**Kata Kunci:** Minerba, Izin Usaha, Pertambangan.

## ***Abstract***

*After the promulgation of Law Number 3 of 2020 many people highlighted the addition of Article 169A which explains the guarantee of extension through special mining business license (IUPK) for contract of work (KK) and work agreement for coal mining exploitation (PKP2B) which will expire. However actually the guarantee of extension is not automatically given but through considerations mandated by the law. The formulation of the problem raised in this study is about the legal certainty of granting IUPK as a continuation of contract/agreement operations and how legal protection for KK and PKP2B if the application for extension of contract/agreement is rejected by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). This study uses a normative juridical research method through literature study with a statutory approach. The result of this study indicate a vagueness of norms which results in the absence of legal certainty in Article 169A of the Minerba Law which regulates IUPK as a continuation of contract/agreement operations. The provisions regarding these rules must be explained using clear and firm phrases in the Government Regulation as derivative rules for implementing the Minerba Law so as not to cause multiple interpretations in order to provide the legal certainty and protection for mining business actors.*

***Key words:*** Minerba, Business License, Mining.